

**STRATEGI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA
DI KABUPATEN TANGERANG, BANTEN
(STUDI DI LANTAMAL III/JKT)**

**EMPOWERMENT STRATEGY OF SEA DEFENSE AREAS PART
INCREASES BELAR STATE AWARENESS IN TENGERANG REGENCY
(STUDY IN LANTAMAL III / JKT)**

Achmad Bastari¹, TSL Toruan², Suhirwan³

(kelapadupermai@gmail.com, samtor_81@yahoo.com, suhirwan32@gmail.com)

Abstrak -- Berdasarkan UU RI No.34 tahun 2004 Tentang TNI Tugas TNI AL, pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan Dawilhanla. Implementasi dari Dawilhanla adalah pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Binpotmar, yang dilaksanakan Lantamal III/JKT di Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini di wilayah pesisir yang diwakili oleh Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teliknaga dan Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk. Tujuan dari Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut adalah: Dalam perspektif kepentingan Hanneg bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Tujuan umum dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut oleh Lantamal III/JKT Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tangerang, Banten. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran bela negara di wilayah pesisir masih rendah dikarenakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir belum sesuai dengan teori strategi pemberdayaan yang disampaikan oleh Suharto dalam strategi pemberdayaan dengan 5P, selain itu juga pelaksanaan sinergitas tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, hal tersebut belum sesuai dengan teori sinergitas menurut Hampdan-Turner dan menurut F.M. Hartanto. Kesimpulan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang, belum berhasil.

Kata kunci: Lantamal III/JKT, Kesadaran Bela Negara, Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

¹ Mahasiswa Program Studi Strategi Perang Semesta, Cohort-9 TA 2017/2018, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Dosen Tetap Program Studi Strategi Perang Semesta, fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Abstract -- Based on the Republic of Indonesia Law No.34 of 2004 concerning TNI, the task of the Navy, in Article 9 paragraph (e); Carry out Dawilhanla. The implementation of Dawilhanla was empowerment of coastal communities through Binpotmar, which was carried out by Lantamal III / JKT in Tangerang Regency, Banten in this case in the coastal area represented by Tanjung Pasir Village, Teliknaga District and Tanjung Anom Village, Mauk District. The purpose of Organizing Empowerment of Marine Defense Areas is: In the perspective of Hanneg's interests, it aims to prepare the area of marine defense and its supporting forces early in order to win the war. In the perspective of public interest aims to help overcome community difficulties and improve the welfare of the maritime community. In the perspective of the interests of the TNI, it aims to achieve the main task of the Navy, in increasing awareness of defense of the state The general purpose of this study was to analyze the Empowerment Strategy of the Sea Defense Region by Lantamal III / JKT in Increasing the National Defense Awareness in Tangerang Regency, Banten. Research uses qualitative methods. Data obtained from the informants determined and then analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that awareness of defending the country in coastal areas was still low because in carrying out the empowerment of coastal communities not in accordance with the theory of empowerment strategies delivered by Suharto in empowerment strategies with 5P, besides that the implementation of synergy was not carried out continuously, it was not in accordance with the theory synergy according to Hampdan-Turner and according to FM Hartanto. The conclusion of the implementation of the strategy of empowering coastal communities in increasing awareness of defense of the country in coastal areas in Tangerang Regency has not been successful.

Key Words: Lantamal III / JKT, National Defense Awareness, Marine Defense Area Empowerment Strategy

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang diapit oleh dua samudera dan dua benua, serta mempunyai posisi geografis unik dan strategis. Posisi tersebut menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat dengan 10 negara di kawasan. Indonesia selain memiliki posisi geografis yang unik, juga memiliki perairan, yang menjadikan sebagai salah satu urat nadi perdagangan Internasional, sehingga Indonesia rawan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan, yang berakibat

terhadap instabilitas, baik di dalam negeri maupun kawasan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim, mempunyai kepentingan dalam membangun keamanan di kawasan, termasuk keamanan maritim, guna mendukung Indonesia sebagai poros Maritim Dunia (PMD). Berkaitan dengan hal tersebut, sangat diperlukan tata kelola sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), wilayah perbatasan, dan pertahanan yang handal.

Perkembangan lingkungan strategis yang terus bergerak sangat dinamis, selalu membawa perubahan terhadap

kondisi ancaman yang kompleks dan berdampak terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman dimasukkan ke dalam pola dan macam ancaman yang multidimensional yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang bisa digolongkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Oleh karena itu, pertahanan negara ke depan membutuhkan keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, dengan usaha membangun kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan pertahanan negara yang andal, kuat dan disegani, serta memiliki daya tangkal tinggi.⁴

Dalam rangka melindungi kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari spektrum ancaman yang kompleks, pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat UUD 1945, diimplementasikan dalam wujud program

bela negara atas dasar kecintaan terhadap tanah air.

Sistem pertahanan semesta merupakan pertahanan bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya pandangan tentang pertahanan yang diabdikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan bisa diartikan sebagai seluruh sumber daya maupun sarana prasarana nasional yang didayagunakan sebagai usaha pertahanan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas maka Kewilayahan bisa diartikan sebagai gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI dengan konstelasi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan juga sebagai negara maritim.⁵

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (dawiha). Hakikat pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah, upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut, dan kekuatan

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2015), hlm 22.

⁵ *Ibid.*, hal 28.

pendukungnya secara dini, sesuai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim.⁶

Penyelenggaraan *dawilhanla* merupakan suatu kegiatan pengelolaan kekayaan Sumber Daya Nasional (*sumdanas*) menjadi kekuatan pertahanan laut dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara, diperlukan suatu kebijakan dan petunjuk yaitu suatu pengertian tentang pemberian pemahaman secara umum dengan pokok bahasan tentang kemampuan sumber daya nasional bidang maritim, yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut yang bersinergi dengan Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara fungsi Pemerintah dibidang pertahanan dengan Kementerian atau institusi lainnya.

Dawilhanla dilaksanakan untuk membangun, dan meningkatkan kekuatan matra laut, dalam rangka membantu pemerintah untuk menyiapkan kekuatan nasional, menjadi kekuatan yang lebih spesifik yaitu wilayah pertahanan laut, dengan kekuatan

pendukungnya, baik Operasi militer Perang (OMP), maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁷ Proses menyiapkan suatu Wilayah Pertahanan beserta kekuatan pendukungnya memiliki hubungan yang berkaitan dengan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim. Pembinaan sektor geografi merupakan penyiapan ruang juang untuk kepentingan manuver pasukan dan penyiapan logistik wilayah, serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung Pertahanan Negara.

Pembinaan pada bidang demografi adalah proses menyiapkan alat juang yang digunakan sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dapat difungsikan untuk membantu Komponen Utama. Dalam situasi damai pembinaan kondisi sosial merupakan usaha menyiapkan kondisi juang yang ditujukan untuk membantu Pemerintah meningkatkan Ketahanan Wilayah melalui pemberdayaan masyarakat desa pesisir, yang bisa diwujudkan sebagai kekuatan Pertahanan Negara pada masa perang.

Dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut sebagai subyek,

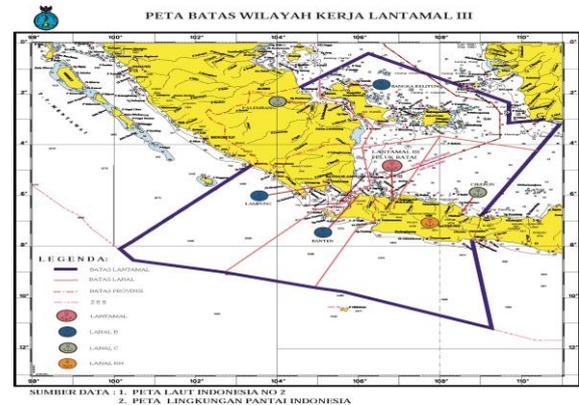
⁶ Peraturan Kasal Nomor Perkasal/39/VII/2011, tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.

⁷ *Ibid.*, hal 10.

melibatkan segenap komponen TNI AL, Pemerintah, dan seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara fungsional, dan proporsional, serta profesional. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem pertahanan negara, meliputi: Mabes TNI Angkatan Laut, Komando armada I dan Pangkalan Utama TNI AL III/JKT – Jakarta (Lantamal III/JKT), Pemerintah, dan masyarakat maritim. Potensi wilayah yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pertahanan wilayah, yang peneliti angkat adalah Kabupaten Tangerang-Banten.

Diperlukan suatu strategi dalam penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, mengingat luasnya wilayah di Kabupaten Tangerang-Banten, dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara, yang dipersiapkan sebagai komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang mampu didayagunakan membantu komponen utama. Untuk itu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian di wilayah tersebut, apakah pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai implementasi dari Dawilhanla melalui pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan oleh Lantamal III, Jakarta dengan strategi Bakti TNI AL, pembinaan ketahanan wilayah, dan komunikasi sosial (komsos) dapat berjalan dengan baik.

Adapun wilayah kerja Lantamal III, seperti tersebut dalam gambar di bawah ini:⁸



Gambar 1.1 Peta Batas Wilayah Kerja Lantamal III/JKT.

Sumber: Lantamal III/JKT-2018

Melihat fenomena yang ada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, di mana masyarakatnya masih rendah kesadarannya terhadap bela negara. Hal itu terlihat dengan kejadian penyelundupan imigran gelap, melalui desa Tanjung Pasir asal Pakistan dan Afganistan menuju Australia pada tahun 2012 sebanyak 109 orang. Selain itu penyelundupan narkoba juga pernah melalui desa ini. Tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga akan terjadi kembali di kecamatan pesisir yang lain di Kabupaten Tangerang selatan-Banten jika kesadaran bela tidak dipupuk sejak dini.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam usaha pertahanan dan

⁸ Slide Selayang Pandang Lantamal III-Jakarta

keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembangunan pertahanan negara disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional, yang dilaksanakan secara sinergi dengan pemerintah daerah.

Sasaran dari penyelenggaraan wilayah pertahanan laut adalah, Terpeliharanya wilayah nasional dan ruang juang yang tangguh serta terkelolanya sumber daya nasional bidang maritim dalam suatu sistem bela negara untuk menunjang kepentingan sistem pertahanan semesta, Terciptanya kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh di laut sekaligus terciptanya komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda yang ada di wilayah untuk kebutuhan pertahanan laut sesuai dengan bidang tugasnya melalui pembinaan potensi maritim.

Melalui strategi pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang

diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pembinaan potensi maritim tersebut, diharapkan meningkatnya kesadaran bela negara masyarakat Kabupaten Tangerang, Banten. Perjuangan bangsa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dengan nilai-nilai luhur yang masih terus dipertahankan. Hal ini terwujud melalui perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang senantiasa melibatkan warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara melalui perwujudan sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada bangsa dan negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dilakukan karena peneliti membutuhkan informasi yang mendalam mengenai strategi pemberdayaan wilayah pertahanan laut dalam meningkatkan kesadaran bela negara di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Peneliti juga menganalisis data-data yang telah diperoleh baik berupa penelitian

terdahulu ataupun dokumen kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sumber data yang digunakan peneliti berupa data primer dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diantaranya: Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Laut (AL), Asisten Potensi Maritim Kasal, Kepala Dinas Potensi Maritim TNI AL, Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal III-Koarmada I, Komandan Pos Pengamatan Kabupaten Tangerang-Banten-Lantamal III, Pemerintah Daerah (Bupati Tangerang, Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Kodim, dan Polres), Ketua Kelompok Nelayan, Tokoh Agama dan Masyarakat. Penelitian ini memilih lokasi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga dan Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini didasarkan pada kedua desa tersebut terdapat Pos Angkatan Laut. Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Maret hingga Oktober 2018.

Hasil Penelitian

Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 246 desa dan 28 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Tigaraksa. Dari 29 kecamatan tersebut,

hanya 7 kecamatan yang berada di wilayah pesisir, yaitu: (1) Kecamatan Kronjo (10 Desa), (2) Kecamatan Kemiri (7 Desa), (3) Kecamatan Mauk (1 kelurahan dan 11 Desa), (4) Kecamatan Pakuhaji (1 Kelurahan dan 13 Desa), (5) Kecamatan Sukadiri (8 Desa), (6) Kecamatan Teluk Naga (13 Desa), (7) Kecamatan Kosambi (3 Kelurahan dan 7 Desa). Dari ketujuh kecamatan yang berjumlah 74 Kelurahan/Desa ini, peneliti memperoleh informasi dari personel pos TNI AL Tanjung Pasir, bahwa warga di desa tersebut tergolong miskin, kesadaran bela negaranya masih sangat rendah.

Pembahasan

Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten

Kesbangpol sebagai lembaga yang membantu Bupati memiliki peran yang penting dalam melaksanakan kebijakan di bidang Kesatuan Kebangsaan dan politik. Kegiatan meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat sebagai contohnya. Untuk mewujudkan sinergitas dalam meningkatkan kesadaran bela negara perlu adanya keterlibatan antara Kesbangpol dengan masyarakat. Namun hasil wawancara dengan pihak terkait didapati keterangan bahwa dari pihak kesbangpol dalam menyusun kegiatan

kesadaran bela negara masih di tahap formil dengan sasaran pihak Pemda. Kegiatan ini diwujudkan dalam acara “Kebhinekaan” dan “Upacara 17-an”. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir seperti Desa Tanjung Pasir belum pernah mendapat kunjungan dari pihak Kesbangpol. Sehingga masyarakat merasa tidak mendapat perhatian. Tidak hadirnya Kesbangpol di wilayah pesisir (Desa Tanjung pasir) mengindikasikan bahwa Kesbangpol belum terlibat dalam meningkatkan kesadaran bela negara.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan wilayah, Kodim sebagai pihak yang memiliki peran dalam menjaga keutuhan wilayah baru dapat mensinergikan masyarakat dalam pemberdayaan wilayah darat, dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara melalui budidaya pertanian dan perkebunan. Wilayah pesisir belum mendapat penanganan maksimal, sehingga terkesan pemberdayaan wilayah masyarakat pesisir kurang mendapat perhatian yang serius dan belum optimal. Hal ini bisa saja terjadi karena wilayah kerja Kodim adalah wilayah darat. Oleh karena itu mereka fokus pada pemberdayaan wilayah darat yang memiliki potensi dalam membangun kesejahteraan masyarakat seperti bertani

dan berkebun. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan atau program meningkatkan kesadaran bela negara di TNI masih sektoral, hal tersebut bisa ditandai dengan belum hadirnya Kodim 0510/Tigaraksa di wilayah pesisir

Dari hasil temuan penelitian di atas mengindikasikan Kesbangpol dan Kodim belum terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir, padahal untuk meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat di wilayah pesisir, maka wilayah tersebut harus diberdayakan, hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Hulme dan Turner dalam teori pemberdayaan, bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

Hal tersebut senada dengan Richard Carver, managing direktor Coverdale Organizational, seorang ahli pemberdayaan, bahwa pemberdayaan dilakukan untuk memberikan dorongan kepada individu-individu atau masyarakat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya bertanggung jawab dan menjadi

lebih baik, sehingga tujuan organisasi tercapai.

Kesadaran Bela negara terkait dengan lima nilai yang mendasarinya, yaitu cinta tanah air, yakin dengan berideologi pancasila, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dari kelima unsur ini dapat diinterpretasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah keterlibatan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah.

Keengganan masyarakat Tanjung Pasir yang tidak mau terlibat dalam pemilihan kepala daerah, mengindikasikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat nelayan masih kurang di wilayah Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Anom. Hal ini disebabkan program Pemda dalam pemberdayaan masyarakat pesisir masih minim. Para nelayan merasa, kehadiran Pemerintah Daerah dan Lantamal III/JKT di kalangan masyarakat nelayan masih kurang, sehingga warga pesisir di Tanjung pasir dan Tanjung Anom merasa terabaikan yang mengakibatkan kesadaran mereka sebagai warga negara yang baik tidak terealisasikan dalam

bentuk partisipasi saat pemilihan kepala daerah.

Kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga lingkungannya, sebagai wujud cinta tanah air, juga dinilai belum tumbuh. Ini terlihat dari kebiasaan masyarakat Tanjung Pasir yang masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Limbah rumah tangga dan tempurung kelapa banyak terlihat berserakan di pinggiran pantai Tanjung Pasir. Salah satu nilai Bela Negara, yaitu cinta tanah air tidak diimplementasikan dengan baik. Salah satu tindakan yang menggambarkan cinta tanah air adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang kotor dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar, ditambah lagi jika dampak tersebut berpengaruh terhadap anak-anak usia sekolah yang rentan terhadap penyakit. Maka dari itu setiap warga masyarakat perlu ditumbuhkan rasa cinta tanah airnya yang dapat berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup sebagai interpretasi dari nilai cinta tanah air.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten

Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sendiri belum

memiliki strategi khusus terkait dengan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir. Namun sebagai implementasi dari nilai cinta tanah air, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan kebutuhan fasilitas melaut bagi para nelayan. Program tersebut diberikan secara bergiliran ke setiap desa di wilayah Tangerang, karena sesuai dengan kebutuhan nelayan untuk melakukan aktifitasnya di laut seperti menangkap ikan.

Program Pemerintah Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Daulay, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar dapat hidup mandiri dengan partisipatif aktif. Partisipatif aktif oleh Pemda Kabupaten Tangerang dengan memberikan fasilitas bantuan berupa alat melaut kepada para nelayan belum dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Hal ini terjadi karena program yang dijalankan oleh Pemda dalam memenuhi kebutuhan alat tangkap ikan yang diajukan nelayan, dengan mengajukan proposal, belum dapat terpenuhi seluruhnya, sesuai yang

dibutuhkan. Pengajuan kebutuhan alat tangkap tersebut diajukan secara bergiliran, mengingat jumlah Desa dan kelurahan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang berjumlah 74.

Strategi seperti yang disebutkan oleh General (Ret) Andrew J. Good Paster memiliki tiga unsur, yaitu *ends*, *means*, dan *ways*. Ketiga unsur tersebut harus terkandung dalam menjalankan suatu strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tujuan (*ends*) dari program TNI AL adalah menyiapkan wilayah pesisir sebagai kekuatan untuk memenangkan perang, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjalankan tugas pokok TNI AL. Kesemua program TNI AL dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Bela Negara masyarakat pesisir agar kelak jika ada ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, masyarakat tersebut dapat sigap dan mudah untuk dimobilisasi.

Sarana (*means*) yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, seperti ketersediaan gedung pertemuan sebagai sarana menyampaikan informasi, komunikasi belum ada, kemudian sarana bak penampungan sampah untuk warga

dengan ukuran yang memadai juga belum ada, sarana rumah pintar untuk tempat membaca warga di Desa Tanjung Anom belum ada, di Desa Tanjung Pasir sudah ada, dapat sumbangan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersati di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010, itupun sudah jarang terpakai karena buku-bukunya masih edisi keluaran yang lama, belum diperbaharui. sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Spotmar Mabel, Dispotmar Mabel dan Lantamal III/JKT dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sudah sangat mendukung, tetapi SDM warga di Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Anom sangat memprihatinkan, tingkat pendidikan anak-anak sebagian besar hanya sampai SMP. Potensi yang dimiliki Desa Tanjung Pasir dan Desa Tanjung Anom dalam pemberdayaan masyarakat juga minim, sumber daya alam (SDA) selain ikan, sebagai penambah penghasilan warga, seperti rajungan dan kerang hijau hasilnya tidak maksimal, karena jaring yang ditebarkan berkualitas rendah sehingga sering robek atau hilang diterjang ombak, demikian juga halnya dengan kerambah, sering hilang dibawa ombak atau dicuri sesama warga. Hasil kerang tangkapan itu sebetulnya bisa diolah menjadi kerajinan tangan berupa

tempat tisu dan bingkai foto dan dapat dijual sebagai oleh-oleh khas daerah Tanjung Pasir. Namun potensi ini belum dapat diaplikasikan secara maksimal mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan tangan tersebut, sehingga penjualan produknya terkendala yang mengakibatkan minimnya pasaran yang mau membeli produk mereka.

Cara (*ways*) yang dilakukan oleh Spotmar Mabel, Dispotmar Mabel dan Lantamal III/JT dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran bela negara adalah dengan menerapkan strategi atau metode, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi sosial. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Kesbangpol belum mempunyai strategi atau metode dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. Metode yang digunakan oleh Pemda adalah Desa dan Kelurahan diperintahkan untuk mengajukan proposal kebutuhan alat tangkap ikan nelayan, tetapi dari jumlah yang diajukan, yang dipenuhi tidak seluruhnya, dan itu diatur secara bergiliran tiap-tiap desa yang berjumlah 74. Sehingga desa yang sudah mendapatkan bantuan, belum tahu lagi kapan mendapat giliran berikutnya.

Strategi TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal III/JKT dalam pemberdayaan wilayah pesisir melalui Bakti TNI Angkatan Laut, Bintahwil dan Komsos. Bakti TNI Angkatan Laut kegiatannya, diantaranya adalah karya bakti, adapun kegiatannya yaitu kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan Lantamal III/JKT bersama masyarakat secara bergotong-royong dengan sasaran fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mempunyai nilai strategis, yaitu melaksanakan pembersihan pantai dari sampah dan limbah tempurung kelapa. Sedangkan kegiatan non fisik, Kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme, berwawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan keterampilan masyarakat guna mendukung ketahanan wilayah dengan melaksanakan penyuluhan.tentang kesadaran bela negara.

Tujuan dari Bakti TNI Angkatan Laut adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kemandirian TNI/TNI AL bersama Rakyat dalam rangka menyiapkan secara dini Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.

Bintahwil kegiatan salah satunya adalah aspek potensi demografi yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi diarahkan pada pendataan dan pembinaan sumber daya manusia yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan yang memiliki kesadaran bela negara, cinta tanah air dan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan yang timbul, baik secara individu maupun kelompok, guna terwujudnya alat juang yang tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT dengan menanam jaring rajungan dan kerambah kerang hijau. Tujuan Bintahwil untuk memantapkan ketahanan wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Pembinaan komunikasi sosial. Salah satu kegiatannya adalah memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah itu. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT melakukan penyuluhan tentang kesadaran bela negara. Tujuan komunikasi sosial adalah Memberikan pemahaman dalam

menyamakan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut kepada seluruh komponen bangsa yang berkaitan dengan Ruang, Alat dan kondisi juang serta memelihara dan meningkatkan kemandirian TNI Angkatan Laut dengan masyarakat maritim dalam rangka pertahanan semesta.

Strategi ini oleh Lantamal III/JKT telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja faktor minimnya anggaran dalam melaksanakan strategi tersebut dihadapkan dengan banyaknya wilayah binaan desa pesisir Lantamal III/JKT, hasilnya menjadi tidak optimal, warga masih mengalami kesulitan. Selain itu Lantamal III/JKT seolah-olah berjalan sendirian dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, karena pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang belum bersungguh-sungguh dalam menangani pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal tersebut belum sesuai dengan teori strategi menurut Glueck & Jauch, strategi merupakan rencana yang disatukan, secara komprehensif yang menggabungkan keunggulan strategis organisasi dengan perkembangan lingkungan, yang telah diatur untuk meyakinkan bahwa tujuan pokok dari perusahaan dapat terwujud

melalui cara yang tepat oleh organisasi, dan juga belum sesuai dengan teori strategi yang disampaikan oleh Craig & Grant, bahwa strategi merupakan penentuan sasaran dan tujuan dalam jangka panjang (targeting and long-term goals) sebuah organisasi yang dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives).

Sinergitas, Antara TNI AL Dengan Pemerintah Daerah Dan Aparat Terkait Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Aspotmar selaku staf umum kebijakan potensi maritim melaksanakan sinergitas dengan aktor-aktor pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu Kementerian/Lembaga dan institusi terkait mengkomunikasikan bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai aktor-aktor pelaksana pemberdayaan masyarakat maritim, yaitu Dispotmar Angkatan Laut dan 14 Pangkalan Utama Angkatan Laut serta 52 Pangkalan Angkatan Laut yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap melaksanakan sinergitas di Provinsi dan Pemda setempat. Di dalam struktur organisasi Dispotmar Angkatan Laut sendiri, selain Kepala Dinas sebagai Aktor sinergitas, stafnya yaitu Kepala Sub Dinas (Kasubdis)

juga sebagai aktor sinergitas pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan Lantamal III/JKT aktor dalam bersinergi dengan Kementerian /Lembaga selain Komandan juga stafnya yaitu Aspotmar dan Kadispotmar Lantamal III/JKT

Sinergitas yang dilakukan oleh Aspotmar, Kadispotmar Mabesal dan Lantamal III/JKT dengan Kementerian/Lembaga meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah lingkup ketahanan pangan seperti budidaya ikan, rajungan dan kerang hijau dengan cara kerambah dan jaring apung. Sinergitas dengan Kementerian Pertahanan juga dilaksanakan dalam penyediaan alat kesehatan untuk Kapal Rumah Sakit TNI AL, sehubungan dengan rencana penambahan pengadaan satu unit lagi kapal rumah sakit untuk membantu kapal yang sudah ada, yaitu KRI. dr. Suharso, mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan gempa.

Dispotmar dan Lantamal III/JKT juga melaksanakan sinergitas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil dari sinergitas berupa kegiatan, yaitu penyuluhan, kerja bakti, dan pembersihan pantai. Namun sinergi-sinergi ini belum terlaksana secara berkesinambungan, sifatnya hanya

insidental saja, sehingga masyarakat pesisir belum merasakan manfaatnya, warga masih merasa kesulitan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis, tidak peduli terhadap lingkungannya. Sinergitas yang dilaksanakan sifatnya semu karena tidak mengomunikasikan atau membahas bentuk kerja sama yang substansi, yaitu apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dalam mengatasi masalah.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas yang dilaksanakan selama ini belum sesuai dengan teori sinergitas *Hampden-Turner*, bahwa sinergi memerlukan proses yang melibatkan berbagai institusi untuk melaksanakan kegiatan, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.

Senada dengan *Hampden-Turner*, menurut F.M. Hartanto, bahwa Sinergitas memerlukan proses yang melibatkan berbagai Institusi untuk melaksanakan kegiatan, dari berbagai macam gagasan yang dilakukan oleh banyak pihak, hingga menghasilkan kerja sama harmonis, yang dapat menghasilkan suatu gagasan baru, lebih dari apa yang diperkirakan oleh siapapun, bagaimana mengatasi masalah.

Kesimpulan

1. Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten

Kesadaran Bela Negara di wilayah pesisir Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Anom masih rendah, Cinta tanah air, Kesadaran akan berbangsa dan benegara serta kemampuan awal bela negara dalam nilai-nilai bela negara belum tampak. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat pesisir tentang bela negara masih rendah, penerapan kesadaran bela negara dan peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran bela negara belum dilaksanakan.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten.

Strategi TNI Angkatan Laut, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Bintahwil dan Komsos jika dilaksanakan sendiri tanpa sinergi dengan Pemda Kabupaten Tangerang pada khususnya dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga pada umumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan sulit terwujud. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir binaan Lantamal III/JKT cukup luas dan minimnya anggaran yang dikelola.

3. Sinergitas, Antara TNI AL Dengan Pemerintah Daerah Dan Aparat Terkait Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Sinergitas yang dilaksanakan oleh Lantamal III/JKT dengan Pemda Kabupaten Tangerang dan pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir belum berjalan dengan baik, aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sinergitas belum bekerja sama dengan maksimal dan masih adanya kendala yang dihadapi yaitu menyatukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat antara Lantamal III/JKT dengan Pemda Kabupaten Tangerang, Banten.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti coba merumuskan saran dan rekomendasi kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha peningkatan kesadaran bela negara di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, diantara:

1. Saran kepada Lantamal III/JKT, sebagai berikut:

a. Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten.

Peran Lantamal III/JKT dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat pesisir di Tanjung Pasir dan Tanjung Anom lebih ditingkatkan melalui kerja sama dengan Pemda dan Perbankan untuk adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah tersebut. Saat ini warga selalu bergantung kepada usaha perbankan swasta yang memberikan pinjaman modal tanpa agunan tetapi bunga pinjamannya relatif tinggi. Nelayan perlu modal untuk pengadaan alat tangkap ikan, perbaikan alat-alat tangkap yang rusak perbaikan perahu dan modal usaha warung dagangan.

b. Strategi Pemberdayaan masyarakat pesisir, Di Kabupaten Tangerang, Banten.

Metode Komunikasi Sosial sebagai salah satu dari tiga metode dalam penyelenggaraan Dawilhanla, yaitu Bakti TNI AL dan Bintangwil dalam pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan. Melalui komunikasi yang intens program kegiatan antara Lantamal III/JKT dengan Pemda Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat,

waktunya pelaksanaannya bisa disamakan.

Untuk tercapainya Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir, perencanaannya bisa dengan menggunakan skala prioritas, multi years program, yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

2. Saran kepada Pemerinta Daerah Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

a. Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pesisir Di Kabupaten.

Peran Pemda dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat pesisir di Tanjung Pasir dan Tanjung Anom lebih ditingkatkan melalui kerja sama dengan Lantamal III/JKT dan Perbankan untuk adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah tersebut. Saat ini warga selalu bergantung kepada usaha perbankan swasta yang memberikan pinjaman modal tanpa agunan tetapi bunga pinjamannya relatif tinggi. Nelayan perlu modal untuk pengadaan alat tangkap ikan, perbaikan alat-alat tangkap yang rusak perbaikan perahu dan modal usaha warung dagangan.

3. Saran kepada peneliti lain, untuk melanjutkan penelitian ini di daerah lain, sebagai berikut:

Untuk dilaksanakan penelitian pemberdayaan masyarakat pesisir berskala nasional, dengan lokus penelitian di Kemenkomaritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenhan. Hal ini selaras dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo pada poin 3, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa pesisir dalam kerangka negara kesatuan. Presiden Joko Widodo bertujuan Indonesia kembali sebagai negara maritim, karena selama ini Indonesia telah lama memunggungi laut, Presiden ingin mengembalikan Indonesia jaya kembali di laut, sehingga Jalasveva Jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu kembali membahana. Tetapi sampai saat ini kehidupan Masyarakat pesisir masih jauh dari sejahtera.

Daftar Pustaka

Buku

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2015).

Glueck William F & Jauch Lawrence R, 1989, "Manajemen dan Strategis Kebijakan Perusahaan". Jakarta: Erlangga

Charles Hampden dan Turner. 1990. "Corporate Culture for Competitive Edge" A User Guide: London, The Economics Publication, p. 9-10.

Harmona Daulay, 2006. "Pemberdayaan Perempuan" Studi Kasus Pedagang Jamu di Gading Johor Medan. Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September 2006

Slamet.2003. "Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi". Surakarta: Sebelas Maret University Press.

HAW, Widjaja.2003. "Otonomi Desa". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Anwas, Oos. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Intenet

Adzkira Ibrahim, "Pengertian Strategi dan Perbedaannya Dengan Taktik" diakses dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-strategi-dan-perbedaannya-dengan-taktik>, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 21.00

Cashman.2014. Pengertian Sinergi adalah Membangun dan Memastikan Hubungan. Diakses dari <https://prezi.com/omztodlpnnqj/pengertian-sinergi-adalah-membangun-dan-memastikan-hubungan/> pada tanggal 31 Juli 2018.

Rendra Drago, pengertian pemberdayaan, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/67984298/Pengertian-Pemberdayaan>, pada tanggal 31 Juli 2018.

Eprints Stain Kudus, diakses dari <http://eprints.stainkudus.ac.id/215/5/005.%20BAB%2011.pdf>. Pada tanggal 31 Juli 2018.

Indonesiastudents.com, 4 Pengertian Pemberdayaan Menurut Para Ahli Lengkap, diakses dari <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pemberdayaan-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 31 Juli 2018.
Bela Negara. Membangun Watak Bangsa. Diakses dari

<https://belanegarari.com/2009/03/02/nilai-nilai-bela-negara/> pada tanggal 1 Agustus 2018.

Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Kasal Nomor Perkasal/39/VII/2011, tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.